

# Pemilihan Rektor UPI dan Proses Demokratisasi

Oleh: Andi Suwirta \*)

Dalam perspektif sejarah lembaga, kelahiran sebuah perguruan tinggi – termasuk UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) – tidak muncul dalam ruang yang hampa. Konteks sosial dan budaya dalam banyak hal turut mewarnai corak perkembangan lembaga tersebut. Di samping, tentu saja, visi dan *policy* yang dimainkan oleh individu atau tokoh yang memimpin lembaga tersebut juga sangat sentral dalam mendudukan posisi dan peran lembaga tersebut pada zamannya. Sebab visi, *policy*, dan program kerja sebuah lembaga pada umumnya banyak ditentukan oleh kualitas manajemen dan integritas pribadi dari individu atau tokoh yang menjadi pemimpin lembaga tersebut (Gaffar, 1994).

Tulisan ini ingin memberikan gambaran tentang sejarah lembaga UPI di satu sisi dan di sisi lain tentang proses demokratisasi di dalamnya, terutama yang berkenaan dengan pemilihan pimpinan lembaga di UPI. Dalam hal ini benar, bahwa UPI adalah milik publik dan merupakan aset nasional dalam bidang pendidikan. Karena itu membicarakan UPI adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan saya harus berterima kasih kepada surat kabar *Pikiran Rakyat (PR)* di Bandung. Sebagai sebuah institusi pengawal opini publik, *PR* merupakan saksi aktual bagi keberadaan dan peran lembaga pendidikan tinggi di Jawa Barat, tidak terkecuali dengan UPI. Bagi para pembaca yang rajin dan tekun membuka-buka *PR* pada tahun 1950/1960-an (ketika institusi pers ini dipimpin oleh Djamal Ali dan Asmara Hadi); atau *PR* pada tahun 1970/1980/1990-an (ketika dipimpin oleh Sakti Alamsyah Siregar dan Atang Ruswita), kita akan mendapatkan sejumlah berita dan opini yang menarik tentang lembaga perguruan tinggi.

## Institusi dan Semangat Demokrasi

UPI didirikan pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 1954. Pada saat didirikan, namanya adalah PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru) Bandung. Berdirinya PTPG merupakan pemikiran dan kebijakan dari Menteri PP dan K (Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan) yang pada waktu itu

---

\*)**Drs. Andi Suwirta, M.Hum.** adalah Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI dan Wakil Ketua MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) Cabang Jawa Barat di Bandung.

dijabat oleh Prof.Mr.H. Muhammad Yamin. Selain PTPG Bandung, oleh Menteri PP dan K diresmikan juga tiga PTPG di tempat lain di Indonesia, yaitu: Batusangkar (Sumatera Barat), Malang (Jawa Timur), dan Tondano (Sulawesi).

Khusus mengenai PTPG Bandung, peresmian berdirinya dilakukan langsung oleh Menteri PP dan K yang ditandai oleh penanaman pohon beringin dan sebuah prasasti dari PM (Perdana Menteri) Mr. Ali Sastroamidjojo. Tentang pendirian PTPG Bandung ini Prof.Mr.H. Muhammad Yamin - sebagaimana dikutip oleh *PR* (21/10/1954) - antara lain menyatakan bahwa sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk memikirkan dan melaksanakan pendidikan guru tingkat universitas. Di PTPG ini nantinya akan digembleng dan dipersiapkan "benih-benih generasi muda" dari seluruh pelosok tanah air Indonesia yang akan membangun dan mencerdaskan bangsa di masa depan. Dasar-dasar dan semangat demokrasi tentang perlunya bangsa yang maju, sejahtera, dan merdeka, dengan demikian, telah tertanam dalam jiwa civitas akademika UPI.

Dalam perkembangan sejarahnya, PTPG Bandung kemudian berubah menjadi FKIP-UNPAD Bandung pada tahun 1957. Suasana kehidupan politik di era Demokrasi Terpimpin membawa implikasi-implikasi pada perguruan tinggi, terutama masalah dualisme dalam pendidikan. Selain FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) muncul lagi lembaga lain sebagai penghasil guru dan tenaga kependidikan, yaitu IPG (Institut Pendidikan Guru). Atas desakan civitas akademika FKIP, pemerintah (dalam hal ini Presiden Soekarno) akhirnya menugaskan Prof.Dr.H. Roeslan Abdulgani - tokoh nasional dan salah seorang kepercayaan Presiden pada awal tahun 1960-an - agar mengatasi masalah dualisme dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Maka pada tahun 1963 itu lahirlah IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Bandung, yang merupakan fusi dari FKIP dan IPG, dengan Prof.Dr.H. Roeslan Abdulgani sebagai Rektornya yang pertama. Proses demokrasi untuk mengintegrasikan dua institusi, dengan demikian, mengawali lahirnya IKIP Bandung. Sebagaimana dinyatakan oleh Prof.Dr.H. Roeslan Abdulgani (1964), bahwa dirinya tidak hanya berusaha untuk mengakhiri masalah dualisme dalam hal ilmu pendidikan dan keguruan, tetapi juga ingin menjadikan IKIP Bandung sebagai lembaga pelopor dan pembina dalam bidang pendidikan di Indonesia.

IKIP Bandung, dan civitas akademikanya, kemudian ditakdirkan untuk menjadi saksi sejarah bagi bangsanya. Pergantian rejim dari pemerintahan Soekarno (Orde Lama, 1959-1966) ke pemerintahan Soeharto (Orde Baru, 1966-1998) membawa dinamika yang khas bagi IKIP Bandung. Pemerintah Orde Baru sendiri terus melakukan konsolidasi dan restrukturisasi, termasuk di bidang pendidikan tinggi. Penataan kampus dan pembinaan kehidupan civitas akademika dilakukan oleh pemerintah dengan menawarkan konsep kebijakan

NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) tahun 1970-an, dan Wawasan Almamater tahun 1980-an. Sebagaimana umumnya sikap pimpinan perguruan tinggi lain, para Rektor IKIP Bandung kemudian menjalankan kebijakan ini dengan akomodatif sambil melakukan apresiasi terhadap kehidupan demokrasi di kampus, pembinaan keagamaan (Islam) yang intensif, serta pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) dan fasilitas yang memadai.

Sebelum Orde Baru runtuh, pada tahun 1997 IKIP Bandung ditawarkan gagasan untuk menerapkan kebijakan *wider mandate* (perluasan fungsi) dalam rangka persiapan konversi menjadi universitas. Setelah didiskusikan oleh civitas akademika dan pimpinan lembaga akhirnya disepakati, bahwa konsep *wider mandate* haruslah ditempatkan dalam koridor untuk memperkokoh visi dan misi IKIP Bandung sebagai lembaga penghasil tenaga pendidik. IKIP Bandung juga memandang perlu mengimplementasikan konsep *cross vertilization* untuk mengembangkan disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya yang relevan.

Memasuki tahun 1998, civitas akademika IKIP Bandung menghadapi peristiwa penting dalam sejarah lembaganya. Sebagaimana dimaklumi bahwa krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 telah membawa implikasi pada keruntuhan politik Orde Baru. Sebagai lembaga yang tetap *concern* pada bidang pendidikan, IKIP Bandung kemudian mengajukan rekomendasi tentang pokok-pokok pemikiran reformasi pendidikan di Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1998, sivitas akademika IKIP Bandung berangkat ke Jakarta dan menyampaikan langsung tentang perlunya reformasi pendidikan di Indonesia kepada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Pada saat itu suasananya sangat mencekam, dan gedung MPR sudah diduduki oleh para mahasiswa yang menghendaki adanya reformasi di negeri ini. Jika sejarah adalah sebuah proses yang kompleks dan banyak faktor kausalitasnya, barangkali boleh juga dikatakan bahwa IKIP Bandung turut memberikan andil dalam perjuangan reformasi dan mempercepat proses demokratisasi di Indonesia. Sebab pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden RI.

Akhirnya pada tahun 1999 IKIP Bandung resmi menjadi UPI. Perubahan nama ini juga tidaklah mudah. Perdebatan panas dan adu argumentasi keras – sebagai refleksi dari proses demokratisasi yang dinamis – mewarnai sidang-sidang senat akademik di IKIP Bandung. Ketika banyak perguruan tinggi eks IKIP lain lebih bersemangat untuk menjadi universitas dengan visi dan misi yang belum jelas, serta memilih nama lembaga yang cenderung primordial dan sesuai dengan nama tempatnya, maka IKIP Bandung termasuk yang sadar akan proses perjalanan sejarahnya, bahwa ia haruslah merupakan lembaga pendidikan guru tingkat universitas dengan visi dan misi yang bisa diperluas,

namun tetap harus bertaraf nasional. Maka disepakati dan lahirlah nama "*Universitas Pendidikan Indonesia*", sebuah kebijakan strategis terbaik berdasarkan hasil penggodogan civitas akademiknya dalam spektrum proses demokratisasi yang sehat.

### **Mekanisme Pemilihan Rektor UPI**

Pada tahun 2004 UPI telah berubah status menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Perubahan status ini, sejalan dengan semangat reformasi, membawa implikasi pula pada tata-cara pemilihan pimpinan UPI. Menurut PP (Peraturan Pemerintah) No.6 Tahun 2004 tentang Penetapan UPI sebagai BHMN dinyatakan, bahwa Rektor dipilih dan diangkat oleh MWA (Majelis Wali Amanah). PP yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri ini juga menyatakan, bahwa MWA adalah organ universitas yang berfungsi untuk mewakili kepentingan pemerintah dan masyarakat. Karena itu anggota MWA mewakili unsur-unsur SA (Senat Akademik), pemerintah, dan masyarakat. Untuk kasus UPI, MWA beranggotakan 20 orang, yang terdiri dari wakil SA (8 orang), wakil pemerintah (1 orang), masyarakat (10 orang), dan wakil rektor (1 orang). Yang terakhir ini adalah anggota MWA yang tidak boleh menjadi ketua dan tidak memiliki hak suara dalam proses pemilihan Rektor.

Unsur SA terdiri dari wakil-wakil Dosen yang Guru Besar dan non Guru Besar. Mereka adalah orang-orang terpercaya, dengan integritas pribadi dan kapasitas intelektual yang baik. Tiap-tiap Fakultas dan Lembaga terwakili dalam SA ini. Sementara itu unsur pemerintah diwakili oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional). Sedangkan unsur dari masyarakat diwakili oleh tokoh-tokoh terkenal dengan reputasi nasional. Adalah menarik bahwa Drs.H. Danny Setiawan, M.Si. (Gubernur Jawa Barat) mau duduk di dalam MWA UPI mewakili masyarakat, sebuah bukti bahwa beliau amat peduli pada kemajuan pendidikan di daerahnya. Kemudian, siapapun tidak akan ragu dengan komitmen dan integritas pribadi orang-orang seperti Prof.Dr.H.A. Syafii Maarif (sejarawan nasional dan tokoh Muhammadiyah); Letjen.(Purn.)Dr.H. Mashudi (mantan Gubernur Jawa Barat dan tokoh nasional); Dra.Hj. Popong O. Djundjuna (tokoh wanita nasional); Ir. Achmad Ganis; Drs. Abdulgani, M.A.; Nurhadi Purwosaputro, M.Sc. (para tokoh pengusaha nasional yang mencintai dunia pendidikan), dan tokoh-tokoh penting lainnya yang mewakili masyarakat.

Selanjutnya, untuk merealisasikan proses pemilihan Rektor UPI, MWA dalam rapatnya tanggal 16 Februari dan 10 Maret 2005 telah membentuk dan menetapkan sebuah panitia. Panitia ini bertugas untuk melakukan proses pendaftaran dan penjangingan kandidat Rektor UPI (28 Maret - 22 April 2005). Semua civitas akademika UPI dan masyarakat umum diberi kesempatan yang

luas untuk mendaftarkan diri, berkompetisi secara terbuka dan sehat. Setelah itu para kandidat Rektor harus melakukan dialog publik (15-19 Mei 2005). Civitas akademika UPI dan masyarakat luas akan menyaksikan visi, misi, dan agenda strategis yang ditawarkan oleh kandidat Rektor seandainya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin UPI 5 tahun ke depan. Dari proses dialog, sosialisasi, dan pembelajaran demokrasi inilah kemudian SA akan menetapkan 3-5 kandidat Rektor yang dinilai layak dan berkualitas untuk diajukan ke MWA (24-26 Mei 2005). Dan MWA inilah yang pada akhirnya akan memilih dan mengangkat Rektor UPI (6-8 Juni 2005). Kalau semua proses itu berjalan dengan lancar, maka pada tanggal 15 Juni 2005 akan dilantik Rektor UPI-BHMN untuk masa bakti 2005-2010.

Mungkin bagus juga kalau saya menawarkan sebuah perspektif yang jembar. Sejatinya, setiap zaman dan institusi itu memiliki corak demokrasiya sendiri. Dahulu, berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku, pimpinan perguruan tinggi itu cukup ditetapkan dan diangkat langsung oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Pendidikan) setelah mempertimbangkan banyak segi secara luas dan mendalam. Dan itu saya kira bijaksana dan baik untuk ukuran zamannya. Sekarang, perguruan tinggi yang sudah berstatus BHMN menetapkan aturan agar pemilihan itu dilakukan oleh MWA, sebuah mekanisme demokrasi di perguruan tinggi yang juga baik dan sejalan dengan semangat reformasi. Masalahnya adalah bahwa memang tidak semua orang puas dengan mekanisme itu, karena demokrasi pada hakekatnya adalah proses pembelajaran yang tiada henti.

Akan halnya yang terjadi di UPI. Saya melihat bahwa memahami mekanisme pemilihan Rektor UPI dan proses demokratisasi sebagai wahana pembelajaran akademik di dalamnya bolehlah juga jika disejajarkan dengan - meminjam istilah para sejarawan (Gottschalk, 1975) - interpretasi terhadap gelas yang berisi air setengahnya. Bagi mereka yang optimis dan punya daya apresiasi tinggi pada sejarah lembaga akan berujar, "*Alhamdulillah*, gelas itu berisi air setengah penuh". Sedangkan mereka yang *nyinyir* pada lembaga akan segera marah dengan sikap berat sebelah, "*Astagfirullah*, airnya setengah kosong!".

Nah, seandainya sikap memposisikan diri adalah pilihan alternatif terbaik yang sama-sama mengandung resiko, saya nampaknya termasuk orang yang optimis dengan masa depan lembaga dan integritas pribadi para pimpinan UPI. Bagi saya, lembaga ini dan para pemimpinnya - sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah - punya wibawa akademik yang tinggi. Lembaga UPI selalu dipimpin oleh figur-figur unggul dengan reputasi nasional. Dalam sejarah pendidikan, khususnya LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) di Indonesia, kita mengenal nama-nama seperti: Muhammad Yamin (1954-1962), Mas Sadarjoen Siswomartoyo (1954-1961), Mas Achmad Gazali

Surianatasudjana (1961-1962), Harsojo (1962-1963), Roeslan Abdulgani (1963-1966), Achmad Sanusi (1966-1971), Garnadi Prawirosudirdjo (1971-1978), Muhammad Numan Somantri (1978-1987), Mas Abdul Kodir (1987-1995), dan Mohammad Fakry Gaffar (1995-2005). Mereka adalah para pendiri (*the founding fathers*) dan pimpinan UPI yang unggul dan terpercaya pada zamannya (Sjamsuddin & Zulkabir, 2004:iv-v).

## **Penutup**

Akhirnya, seperti dikatakan oleh Drs. Abdulgani, M.A. (Ketua MWA) dalam konferensi pers, kini civitas akademika UPI sedang menunggu hadirnya pemimpin sejati, yaitu seorang figur yang di satu sisi memiliki integritas pribadi, kualitas pemikiran dan ketakwaan, serta gaya manajemen yang profesional; dan di sisi lain mampu membawa UPI ke arah kemajuan, kesejahteraan, dan kemodernan sehingga menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia, dan bahkan masyarakat Internasional.

Karenanya, marilah kita sukseskan acara pemilihan Rektor UPI melalui cara-cara demokrasi, sebuah mekanisme yang sudah jelas aturan mainnya. Sebab esensi dari demokrasi adalah juga taat asas pada aturan yang telah disepakati bersama. Tanpa itu demokrasi akan menjadi anarki.

# Pemilihan Rektor UPI dan Proses Demokratisasi

Oleh: Andi Suwirta \*)

Dalam perspektif sejarah lembaga, kelahiran sebuah perguruan tinggi – termasuk UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) – tidak muncul dalam ruang yang hampa. Konteks sosial dan budaya dalam banyak hal turut mewarnai corak perkembangan lembaga tersebut. Di samping, tentu saja, visi dan *policy* yang dimainkan oleh individu atau tokoh yang memimpin lembaga tersebut juga sangat sentral dalam mendudukan posisi dan peran lembaga tersebut pada zamannya. Sebab visi, *policy*, dan program kerja sebuah lembaga pada umumnya banyak ditentukan oleh kualitas manajemen dan integritas pribadi dari individu atau tokoh yang menjadi pemimpin lembaga tersebut (Gaffar, 1994).

Tulisan ini ingin memberikan gambaran tentang sejarah lembaga UPI di satu sisi dan di sisi lain tentang proses demokratisasi di dalamnya, terutama yang berkenaan dengan pemilihan pimpinan lembaga di UPI. Dalam hal ini benar, bahwa UPI adalah milik publik dan merupakan aset nasional dalam bidang pendidikan. Karena itu membicarakan UPI adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan saya harus berterima kasih kepada surat kabar *Pikiran Rakyat (PR)* di Bandung. Sebagai sebuah institusi pengawal opini publik, *PR* merupakan saksi aktual bagi keberadaan dan peran lembaga pendidikan tinggi di Jawa Barat, tidak terkecuali dengan UPI. Bagi para pembaca yang rajin dan tekun membuka-buka *PR* pada tahun 1950/1960-an (ketika institusi pers ini dipimpin oleh Djamal Ali dan Asmara Hadi); atau *PR* pada tahun 1970/1980/1990-an (ketika dipimpin oleh Sakti Alamsyah Siregar

---

\*)**Drs. Andi Suwirta, M.Hum.** adalah Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI dan Wakil Ketua MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) Cabang Jawa Barat di Bandung.

dan Atang Ruswita), kita akan mendapatkan sejumlah berita dan opini yang menarik tentang lembaga perguruan tinggi.

### **Institusi dan Semangat Demokrasi**

UPI didirikan pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 1954. Pada saat didirikan, namanya adalah PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru) Bandung. Berdirinya PTPG merupakan pemikiran dan kebijakan dari Menteri PP dan K (Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan) yang pada waktu itu dijabat oleh Prof.Mr.H. Muhammad Yamin. Selain PTPG Bandung, oleh Menteri PP dan K diresmikan juga tiga PTPG di tempat lain di Indonesia, yaitu: Batusangkar (Sumatera Barat), Malang (Jawa Timur), dan Tondano (Sulawesi).

Khusus mengenai PTPG Bandung, peresmian berdirinya dilakukan langsung oleh Menteri PP dan K yang ditandai oleh penanaman pohon beringin dan sebuah prasasti dari PM (Perdana Menteri) Mr. Ali Sastroamidjojo. Tentang pendirian PTPG Bandung ini Prof.Mr.H. Muhammad Yamin - sebagaimana dikutip oleh *PR* (21/10/1954) - antara lain menyatakan bahwa sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk memikirkan dan melaksanakan pendidikan guru tingkat universitas. Di PTPG ini nantinya akan digembleng dan dipersiapkan "benih-benih generasi muda" dari seluruh pelosok tanah air Indonesia yang akan membangun dan mencerdaskan bangsa di masa depan. Dasar-dasar dan semangat demokrasi tentang perlunya bangsa yang maju, sejahtera, dan merdeka, dengan demikian, telah tertanam dalam jiwa civitas akademika UPI.

Dalam perkembangan sejarahnya, PTPG Bandung kemudian berubah menjadi FKIP-UNPAD Bandung pada tahun 1957. Suasana kehidupan politik di era Demokrasi Terpimpin membawa implikasi-implikasi pada perguruan tinggi, terutama masalah dualisme dalam pendidikan. Selain FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) muncul lagi lembaga lain sebagai penghasil guru dan tenaga kependidikan, yaitu IPG (Institut Pendidikan Guru). Atas desakan civitas akademika FKIP, pemerintah (dalam hal ini Presiden Soekarno) akhirnya menugaskan Prof.Dr.H. Roeslan Abdulgani - tokoh nasional dan salah seorang kepercayaan Presiden pada awal tahun 1960-an - agar mengatasi masalah dualisme dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Maka pada tahun 1963 itu lahirlah IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Bandung, yang merupakan fusi dari FKIP dan IPG, dengan Prof.Dr.H. Roeslan Abdulgani sebagai Rektornya yang pertama. Proses demokrasi untuk mengintegrasikan dua institusi, dengan demikian, mengawali lahirnya IKIP Bandung. Sebagaimana dinyatakan oleh Prof.Dr.H. Roeslan Abdulgani (1964), bahwa dirinya tidak hanya berusaha untuk mengakhiri masalah dualisme dalam hal ilmu pendidikan dan keguruan, tetapi juga ingin menjadikan IKIP

Bandung sebagai lembaga pelopor dan pembina dalam bidang pendidikan di Indonesia.

IKIP Bandung, dan civitas akademiknya, kemudian ditakdirkan untuk menjadi saksi sejarah bagi bangsanya. Pergantian rejim dari pemerintahan Soekarno (Orde Lama, 1959-1966) ke pemerintahan Soeharto (Orde Baru, 1966-1998) membawa dinamika yang khas bagi IKIP Bandung. Pemerintah Orde Baru sendiri terus melakukan konsolidasi dan restrukturisasi, termasuk di bidang pendidikan tinggi. Penataan kampus dan pembinaan kehidupan civitas akademika dilakukan oleh pemerintah dengan menawarkan konsep kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) tahun 1970-an, dan Wawasan Almamater tahun 1980-an. Sebagaimana umumnya sikap pimpinan perguruan tinggi lain, para Rektor IKIP Bandung kemudian menjalankan kebijakan ini dengan akomodatif sambil melakukan apresiasi terhadap kehidupan demokrasi di kampus, pembinaan keagamaan (Islam) yang intensif, serta pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) dan fasilitas yang memadai.

Sebelum Orde Baru runtuh, pada tahun 1997 IKIP Bandung ditawarkan gagasan untuk menerapkan kebijakan *wider mandate* (perluasan fungsi) dalam rangka persiapan konversi menjadi universitas. Setelah didiskusikan oleh civitas akademika dan pimpinan lembaga akhirnya disepakati, bahwa konsep *wider mandate* haruslah ditempatkan dalam koridor untuk memperkokoh visi dan misi IKIP Bandung sebagai lembaga penghasil tenaga pendidik. IKIP Bandung juga memandang perlu mengimplementasikan konsep *cross vertilization* untuk mengembangkan disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya yang relevan.

Memasuki tahun 1998, civitas akademika IKIP Bandung menghadapi peristiwa penting dalam sejarah lembaganya. Sebagaimana dimaklumi bahwa krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 telah membawa implikasi pada keruntuhan politik Orde Baru. Sebagai lembaga yang tetap *concern* pada bidang pendidikan, IKIP Bandung kemudian mengajukan rekomendasi tentang pokok-pokok pemikiran reformasi pendidikan di Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1998, sivitas akademika IKIP Bandung berangkat ke Jakarta dan menyampaikan langsung tentang perlunya reformasi pendidikan di Indonesia kepada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Pada saat itu suasananya sangat mencekam, dan gedung MPR sudah diduduki oleh para mahasiswa yang menghendaki adanya reformasi di negeri ini. Jika sejarah adalah sebuah proses yang kompleks dan banyak faktor kausalitasnya, barangkali boleh juga dikatakan bahwa IKIP Bandung turut memberikan andil dalam perjuangan reformasi dan mempercepat proses demokratisasi di Indonesia. Sebab pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden RI.

Akhirnya pada tahun 1999 IKIP Bandung resmi menjadi UPI. Perubahan nama ini juga tidaklah mudah. Perdebatan panas dan adu argumentasi keras - sebagai refleksi dari proses demokratisasi yang dinamis - mewarnai sidang-sidang senat akademik di IKIP Bandung. Ketika banyak perguruan tinggi eks IKIP lain lebih bersemangat untuk menjadi universitas dengan visi dan misi yang belum jelas, serta memilih nama lembaga yang cenderung primordial dan sesuai dengan nama tempatnya, maka IKIP Bandung termasuk yang sadar akan proses perjalanan sejarahnya, bahwa ia haruslah merupakan lembaga pendidikan guru tingkat universitas dengan visi dan misi yang bisa diperluas, namun tetap harus bertaraf nasional. Maka disepakati dan lahirlah nama "*Universitas Pendidikan Indonesia*", sebuah kebijakan strategis terbaik berdasarkan hasil penggodogan civitas akademiknya dalam spektrum proses demokratisasi yang sehat.

Jadi sangat ganjil dan *absurd* jika akhir-akhir ini masih ada sebagian orang -terutama yang bergabung dalam Forum Peduli Masa Depan di UPI - mempertanyakan perubahan status lembaganya dari *institut* ke *universitas* (Nurulpaik dalam *PR*, 23/02/2005). Mungkin orang-orang seperti ini masih buta terhadap realitas sejarah, terlelap tidur di tengah arus perubahan lembaganya yang dinamis, dan ketika terjaga menjadi tidak siap, gagap, dan *pangling* dengan lingkungan sekitar. Lagi pula forum tersebut menunjukkan wataknya yang tidak demokratis. Organisasinya yang semula bersifat kolektif (presidium) telah berubah menjadi otoriter, karena ditentukan dan dikendalikan oleh segelintir orang. *Discourse* yang diusungnya juga tidak cerdas, lebih banyak menggunakan bahasa tendensius dan vulgar. Menuduh orang lain yang tidak sejalan dengan pendirian forum sebagai "penakut, penjilat, dan pengkhianat" adalah bahasa yang hanya pantas diucapkan oleh para politisi bermoral rendah, bukan oleh para akademisi dengan sikap asketisme intelektual yang tinggi.

### **Mekanisme Pemilihan Rektor UPI**

Pada tahun 2004 UPI telah berubah status menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Perubahan status ini, sejalan dengan semangat reformasi, membawa implikasi pula pada tata-cara pemilihan pimpinan UPI. Menurut PP (Peraturan Pemerintah) No.6 Tahun 2004 tentang Penetapan UPI sebagai BHMN dinyatakan, bahwa Rektor dipilih dan diangkat oleh MWA (Majelis Wali Amanah). PP yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri ini juga menyatakan, bahwa MWA adalah organ universitas yang berfungsi untuk mewakili kepentingan pemerintah dan masyarakat. Karena itu anggota MWA mewakili unsur-unsur SA (Senat Akademik), pemerintah, dan masyarakat. Untuk kasus UPI, MWA beranggotakan 20 orang, yang terdiri dari wakil SA (8 orang), wakil pemerintah (1 orang), masyarakat (10 orang), dan

wakil rektor (1 orang). Yang terakhir ini adalah anggota MWA yang tidak boleh menjadi ketua dan tidak memiliki hak suara dalam proses pemilihan Rektor.

Unsur SA terdiri dari wakil-wakil Dosen yang Guru Besar dan non Guru Besar. Mereka adalah orang-orang terpercaya, dengan integritas pribadi dan kapasitas intelektual yang baik. Tiap-tiap Fakultas dan Lembaga terwakili dalam SA ini. Sementara itu unsur pemerintah diwakili oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional). Sedangkan unsur dari masyarakat diwakili oleh tokoh-tokoh terkenal dengan reputasi nasional. Adalah menarik bahwa Drs.H. Danny Setiawan, M.Si. (Gubernur Jawa Barat) mau duduk di dalam MWA UPI mewakili masyarakat, sebuah bukti bahwa beliau amat peduli pada kemajuan pendidikan di daerahnya. Kemudian, siapapun tidak akan ragu dengan komitmen dan integritas pribadi orang-orang seperti Prof.Dr.H.A. Syafii Maarif (sejarawan nasional dan tokoh Muhammadiyah); Letjen.(Purn.)Dr.H. Mashudi (mantan Gubernur Jawa Barat dan tokoh nasional); Dra.Hj. Popong O. Djundjunan (tokoh wanita nasional); Ir. Achmad Ganis; Drs. Abdulgani, M.A.; Nurhadi Purwosaputro, M.Sc. (para tokoh pengusaha nasional yang mencintai dunia pendidikan), dan tokoh-tokoh penting lainnya yang mewakili masyarakat.

Selanjutnya, untuk merealisasikan proses pemilihan Rektor UPI, MWA dalam rapatnya tanggal 16 Februari dan 10 Maret 2005 telah membentuk dan menetapkan sebuah panitia. Panitia ini bertugas untuk melakukan proses pendaftaran dan penjangkaran kandidat Rektor UPI (28 Maret - 22 April 2005). Semua civitas akademika UPI dan masyarakat umum diberi kesempatan yang luas untuk mendaftarkan diri, berkompetisi secara terbuka dan sehat. Setelah itu para kandidat Rektor harus melakukan dialog publik (15-19 Mei 2005). Civitas akademika UPI dan masyarakat luas akan menyaksikan visi, misi, dan agenda strategis yang ditawarkan oleh kandidat Rektor seandainya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin UPI 5 tahun ke depan. Dari proses dialog, sosialisasi, dan pembelajaran demokrasi inilah kemudian SA akan menetapkan 3-5 kandidat Rektor yang dinilai layak dan berkualitas untuk diajukan ke MWA (24-26 Mei 2005). Dan MWA inilah yang pada akhirnya akan memilih dan mengangkat Rektor UPI (6-8 Juni 2005). Kalau semua proses itu berjalan dengan lancar, maka pada tanggal 15 Juni 2005 akan dilantik Rektor UPI-BHMN untuk masa bakti 2005-2010.

Jadi, jika ada sebagian orang yang masih memplesetkan, dengan nada mengejek, lembaga-lembaga seperti: UPI (*Universitas Padahal IKIP*), BHMN (*Bangunan Hade Meunang Nippong*), dan MWA (*Majelis Warahan Aing*) menunjukkan kecenderungan dua hal. *Pertama*, plesetan-plesetan itu diproduksi oleh mereka yang memiliki kualitas pemikiran hanya pantas disejajarkan dengan para aktor "ketoprak humor". Gejala yang acapkali

mengemuka adalah bahwa kita bisa tersenyum sesaat dengan dagelan-dagelannya yang ganjil, namun selebihnya adalah rasa muak karena tidak memberikan pencerahan intelektual sedikitpun. *Kedua*, mereka tidak memiliki kesadaran tentang sejarah lembaga dan tidak menghargai integritas pribadi para pemimpinnya. Terma-terma yang diproduksi oleh mereka, misalnya saja, "lembaga ini seperti *buntel kadut*" (Permana dalam *PR*, 20/10/2004); dan "telah terjadi aristokrasi akademik di UPI" (Darmawan dalam *PR*, 08/03/2005) menunjukkan sikap kalap mereka pada kewibawaan lembaga.

## Penutup

Mungkin bagus juga kalau saya menawarkan sebuah perspektif yang jembar. Sejatinya, setiap zaman dan institusi itu memiliki corak demokrasiya sendiri. Dahulu, berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku, pimpinan perguruan tinggi itu cukup ditetapkan dan diangkat langsung oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Pendidikan) setelah mempertimbangkan banyak segi secara luas dan mendalam. Dan itu saya kira bijaksana dan baik untuk ukuran zamannya. Sekarang, perguruan tinggi yang sudah berstatus BHMN menetapkan aturan agar pemilihan itu dilakukan oleh MWA, sebuah mekanisme demokrasi di perguruan tinggi yang juga baik dan sejalan dengan semangat reformasi. Masalahnya adalah bahwa memang tidak semua orang puas dengan mekanisme itu, karena demokrasi pada hakekatnya adalah proses pembelajaran yang tiada henti.

Akan halnya yang terjadi di UPI. Saya melihat bahwa memahami mekanisme pemilihan Rektor UPI dan proses demokratisasi sebagai wahana pembelajaran akademik di dalamnya bolehlah juga jika disejajarkan dengan - meminjam istilah para sejarawan (Gottschalk, 1975) - interpretasi terhadap gelas yang berisi air setengahnya. Bagi mereka yang optimis dan punya daya apresiasi tinggi pada sejarah lembaga akan berujar, "*Alhamdulillah*, gelas itu berisi air setengah penuh". Sedangkan mereka yang *nyinyir* pada lembaga akan segera marah dengan sikap berat sebelah, "*Astagfirullah*, airnya setengah kosong!".

Nah, seandainya sikap memposisikan diri adalah pilihan alternatif terbaik yang sama-sama mengandung resiko, saya nampaknya termasuk orang yang optimis dengan masa depan lembaga dan integritas pribadi para pimpinan UPI. Bagi saya, lembaga ini dan para pemimpinnya - sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah - punya wibawa akademik yang tinggi. Lembaga UPI selalu dipimpin oleh figur-figur unggul dengan reputasi nasional. Dalam sejarah pendidikan, khususnya LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) di Indonesia, kita mengenal nama-nama seperti: Muhammad Yamin (1954-1962), Mas Sadarjoen Siswomartoyo (1954-1961), Mas Achmad Gazali Surianatasudjana (1961-1962), Harsojo (1962-1963), Roeslan Abdulgani (1963-

1966), Achmad Sanusi (1966-1971), Garnadi Prawirosudirdjo (1971-1978), Muhammad Numan Somantri (1978-1987), Mas Abdul Kodir (1987-1995), dan Mohammad Fakry Gaffar (1995-2005). Mereka adalah para pendiri (*the founding fathers*) dan pimpinan UPI yang unggul dan terpercaya pada zamannya (Sjamsuddin & Zulkabir, 2004:iv-v).

Akhirnya, kini civitas akademika UPI sedang menunggu hadirnya pemimpin sejati, yaitu seorang figur yang di satu sisi memiliki integritas pribadi, kualitas pemikiran dan ketakwaan, serta gaya manajemen yang profesional; dan di sisi lain mampu membawa UPI ke arah kemajuan, kesejahteraan, dan kemodernan sehingga menjadi kebanggaan nasional. Karenanya, marilah kita sukseskan acara pemilihan Rektor UPI melalui cara-cara demokrasi, sebuah mekanisme yang sudah jelas aturan mainnya. Sebab esensi dari demokrasi adalah juga taat asas pada aturan yang telah disepakati bersama. Tanpa itu demokrasi akan menjadi anarki.

*Vijaya Kusuma, Cipadung,  
Bandung, 12 Maret 2005*